

**Abstrak dan Executive Summary
Penelitian Hibah Bersaing**



**MODEL PENERIMAAN DAN KESUKSESAN IMPLEMENTASI SIPKD
BERBASIS AKRUAL DI LINGKUNGAN SKPD PEMERINTAH KOTA
SURABAYA**

Peneliti:

WAHYU AGUS WINARNO, S.E., M.Sc., Ak.

(NIDN. 0010088301)

HENDRAWAN SANTOSA PUTRA, S.E., M.Si., Ak.

(NIDN. 0006057405)

**UNIVERSITAS JEMBER
JANUARI 2017**

MODEL PENERIMAAN DAN KESUKSESAN IMPLEMENTASI SIPKD BERBASIS
AKRUAL DI LINGKUNGAN SKPD PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Peneliti : Wahyu Agus Winarno¹, Hendrawan Santosa Putra²
Mahasiswa Terlibat : Dwi Ayu Pengesti W³, Rizqi Nastasiya Amalia⁴
Sumber Dana : DP2M Tahun Anggaran 2016
Kontak Email : wahyuagus_winarno@yahoo.com dan
hendrawanputra@yahoo.com
Diseminasi :

¹Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

² Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

³ Alumni Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

⁴ Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

Abstrak:

Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang penerapan akuntansi berbasis akrual (Accrual Accounting) pada pelaporan keuangan pemerintah (Government Financial Reporting) memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan sistem akuntansi pemerintah di Indonesia. Peraturan ini akan di implementasikan secara penuh pada tahun 2015. Perubahan basis pengakuan ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap kesiapan sumber daya manusia dan sistem informasi akuntansinya. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang selama ini berjalan dengan cash basis toward accrual juga akan mengalami perubahan. Dalam proses perubahan implementasi sistem tersebut, memberikan dampak perilaku bagi pengguna baik dalam bentuk penerimaan maupun resistensi penggunaannya. Meskipun SIMDA adalah sebuah sistem yang mandatori, namun perilaku pengguna atas perubahan sistem akan menentukan kesuksesan implementasi SIMDA baru yang berbasis akuntansi akrual.

Dengan menggunakan konseptual dasar dari Technology Acceptance Model, penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu mengembangkan model perilaku pengguna atas penerimaan teknologi dan model kesuksesan implementasi SIMDA berbasis akuntansi akrual. Model ini diharapkan dapat digunakan untuk memprediksi/ menjelaskan perilaku penerimaan atas pengguna SIMDA dan menjelaskan kesuksesan implementasi SIMDA berbasis akuntansi akrual.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Populasi target dalam penelitian ini adalah para Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Teknik penyampelan menggunakan cluster random sampling, sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden. Selanjutnya, pengujian hipotesis secara statistik menggunakan model persamaan struktural (Structural Equation Modeling – SEM) dengan pendekatan berbasis varian yaitu Partial Least Squares (PLS).

Key word: akuntansi akrual, SIMDA, *Technology Acceptance Model*, *GFRIS*

Executive Summary:
**MODEL PENERIMAAN DAN KESUKSESAN IMPLEMENTASI SIPKD
BERBASIS AKRUAL DI LINGKUNGAN SKPD PEMERINTAH KOTA
SURABAYA**

Peneliti : Wahyu Agus Winarno¹, Hendrawan Santosa Putra²
Mahasiswa Terlibat : Dwi Ayu Pengesti W³, Rizqi Nastasiya Amalia⁴
Sumber Dana : DP2M Tahun Anggaran 2016
Kontak Email : wahyuagus_winarno@yahoo.com dan
hendrawanputra@yahoo.com
Diseminasi :

¹Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

² Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

³ Alumni Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

⁴ Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

1. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENELITIAN

Reformasi keuangan negara yang tertuang dalam UU No 17 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa basis pengakuan akuntansi entitas pelaporan pemerintah harus berubah dari basis kas menjadi basis akrual. Strategi perubahan basis pengakuan ini oleh Pemerintah Indonesia dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2005 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) yang digunakan untuk entitas pelaporan baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Kemudian pada tahun 2010, diterbitkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

Perubahan-perubahan tersebut mempunyai dampak secara langsung kepada proses implementasi, baik dari sisi penyusunan kebijakan akuntansi maupun proses migrasi sistem informasinya. Pengalaman di beberapa negara yang melakukan perubahan basis akuntansi menunjukkan hasil berbeda-beda. Seperti pada pemerintahan Selandia Baru, Australia, Inggris, Spanyol, Swedia, Kanada, Prancis, Belgia, dan Irlandia sudah menunjukkan kegunaan dari penggunaan basis akrual (Nasi dan Steccolini 2008). Kegunaan tersebut

antara lain untuk kepatuhan terhadap hubungan kontraktual, alokasi dan penggunaan sumber daya, pengelolaan kas, kemampuan untuk memenuhi kewajiban dan komitmen, perubahan kondisi finansial, serta kinerja finansial dalam kaitannya dengan keputusan biaya.

Meskipun memberikan kegunaan, penerapan basis akrual dalam konteks pemerintahan masih memiliki kendala. Penggunaan informasi akrual masih sedikit digunakan oleh pihak eksternal, baik untuk kepentingan pertanggungjawaban maupun penilaian kinerja (Saleh dan Pendlebury 2006). Bagi pihak internalpun, informasi akrual secara umum tidak digunakan untuk mendukung aktivitas internal dan pengambilan keputusan (Nasi dan Steccolini 2008). Pemahaman personel akuntansi terhadap konsep akrual masih kurang memadai (Jorge et al. 2007). Hal ini disebabkan karena persepsi manfaat informasi akrual yang dimiliki pembuat informasi lebih tinggi dibandingkan dengan pengguna informasi (Chang et al. 2008). Hal-hal tersebut tidak terlepas dari peran sistem informasi dan teknologi informasi yang penting dalam pengembangan akuntansi akrual (Saleh dan Pendlebury 2006).

Dari penjelasan-penjelasan di atas, maka perubahan basis pengakuan akuntansi di Pemerintah Indonesia merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti. Perubahan basis pengakuan tersebut akan berdampak pada perubahan sistem informasi yang digunakan yang selama ini dalam bentuk Sistem informasi keuangan Daerah. Sistem yang sebelumnya dikembangkan dan berjalan dengan konsep *cash basis toward accrual* harus dirubah menjadi *accrual basis*. Hal ini akan mempunyai dampak pada pengguna atas pengoperasian sistem tersebut. Meskipun perubahan tersebut merupakan sesuatu yang *mandatory* dari pemerintah, tetapi dari sisi pengguna akan mempunyai dampak perilaku atas perubahan sistem tersebut secara berbeda-beda. Ada yang merasa lebih mudah dengan sistem yang lama (ada resistensi pengguna), ada juga yang merasa lebih bermanfaat dengan sistem yang sekarang. Wangpipatwong et al. (2008) menemukan bahwa minat berperilaku menggunakan sistem beserta informasi yang dihasilkan, dipengaruhi oleh kemudahan penggunaan dan kebermanfaatannya dari sistem dan informasi tersebut.

Dengan menggunakan model TAM 3 yang dikembangkan (Venkatesh dan Bala 2008), maka perubahan perilaku pengguna sistem tersebut dapat dijelaskan.

2. METODA PENELITIAN

Peneliti mengumpulkan data melalui kuesioner dengan survei langsung untuk menangkap konstruk yang ada di dalam model TAM. Responden dari penelitian ini adalah para Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), bendahara pengeluaran, dan bendahara penerimaan SKPD Pemerintah Kota Surabaya Indonesia. Kota Surabaya dipilih karena merupakan satu dari lima kota besar di Indonesia yang menjadi proyek percontohan dalam penerapan GFRIS berbasis akrual. Koesioner disebarakan ke seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan *cluster* SKPD yang ada.

Untuk mengukur konstruk dalam model, peneliti mengembangkan instrumen atas konstruk *Perceived Usefulness*, *Perceived Ease of Use*, *Attitude toward using*, *Intention to Use*, dan *actual usage* dengan mengadopsi instrumen dari peneliti sebelumnya (Davis 1989; Davis et al. 1989; Davis 1991; Venkatesh et al. 2003; Göğüş dan Özer 2014; Venkatesh dan Bala 2008). Variabel anteseden dari kunstruk *Perceived Usefulness* yang digunakan dari model TAM 3 adalah *Job relevance* dan *output quality* yang diadupsi dari (Venkatesh dan Davis 2000). Sedangkan variabel anteseden *Perceived Ease of Use* yang dimasukkan dalam model penelitian ini adalah *Computer Self-Efficacy* (Compeau dan Higgins 1995b, 1995a), *perception of external control* (Venkatesh et al. 2003), *computer anxiety* dan *perceived enjoyment* (Venkatesh 2000).

3. PEMAPARAN HASIL

3.1 Akuntansi Berbasis Akrual

Berdasarkan Permendagri 64/2013, terdapat 2(dua) peraturan yang wajib ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi/Kab/Kota, yaitu Pertama Peraturan tentang Kebijakan Akuntansi dan Kedua Peraturan tentang Sistem Akuntansi. Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Surabaya adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah. Peraturan kepala daeah yang mengatur kebijakan akuntansi dan SAPD ditetapkan paling lambat tanggal 31 Mei 2014 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 (1) Permendagri

64/2013: “Peraturan kepala daerah yang mengatur kebijakan akuntansi pemerintah daerah ... dan peraturan kepala daerah yang mengatur SAPD... ditetapkan paling lambat 31 Mei 2014.”

Dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), yang perlu disiapkan adalah kapasitas dan kuantitas SDM yang mempunyai kompetensi dalam bidang akuntansi keuangan pemerintah daerah berbasis akrual, manajemen aset dan penatausahaan keuangan seiring dengan penerapan akuntansi keuangan berbasis basis. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan bagi SDM di setiap SKPD dan PPKD untuk memperoleh kompetensi dimaksud sehingga hal ini akan mendorong implementasi/penerapan kebijakan dan sistem akuntansi berbasis akrual.

Menurut Simanjuntak (2010), ada beberapa tantangan dalam implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Indonesia. Pertama, sistem akuntansi dan *IT Based System*, melihat kompleksitas implementasi akuntansi berbasis akrual, dapat dipastikan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual di lingkungan pemerintahan memerlukan sistem akuntansi dan *IT based system* yang lebih rumit. Kedua, perlu juga dibangun sistem pengendalian intern yang memadai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Ketiga, komitmen dari pimpinan, dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Keempat, tersedianya SDM yang kompeten, penyiapan dan penyusunan laporan keuangan tersebut memerlukan SDM yang menguasai akuntansi pemerintahan. Kelima, resistensi terhadap perubahan, sebagai layaknya untuk setiap perubahan, bisa jadi ada pihak internal yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama dan enggan untuk mengikuti perubahan.

3.2 *Technology Acceptance Model (TAM)*

Teori dasar TAM menyatakan bahwa belief–attitude–intention–behavior causal relationship untuk menjelaskan dan memprediksi penerimaan sebuah sistem baru (Sipior et al. 2011). Venkatesh et al. (2003) menyatakan bahwa model TAM dikembangkan untuk konteks sistem informasi, dan didesain untuk memprediksi penerimaan dan penggunaan teknologi informasi dalam pekerjaan. TAM dikembangkan oleh Davis et al. (1989) berdasarkan model TRA (*Theory of Reasoned Action* – (Fishbein dan Ajzen 1975). Tujuan dari model TAM adalah untuk menyediakan sebuah penjelasan mengenai determinan penerimaan komputer secara umum, kemampuan menjelaskan perilaku pengguna akhir

teknologi (Davis et al. 1989). TAM menyatakan bahwa ada dua komnstruk yaitu *perceived usefulness* dan *perceived ease of use*, yang dapat menjelaskan perilaku pengguna dalam penggunaan komputer/ sistem informasi (Davis et al. 1989). Sikap terhadap perilaku (*attitude towards behavior*) didefinisikan oleh Davis et al. (1989) sebagai perasaan positif atau negatif dari seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan ditentukan (“*an individual’s positive or negative feelings about performing the target behavior*”). Sikap terhadap perilaku (*attitude towards behavior*) juga didefinisikan oleh Mathieson Mathieson (1991) sebagai evaluasi pemakai tentang ketertarikannya menggunakan sistem (“*the user’s evaluation of the desirability of his or her using system*”). Minat perilaku (*behavioral intention*) didefinisikan oleh Davis et al. (1989) sebagai suatu keinginan (minat) seseorang untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Seseorang akan melakukan suatu perilaku (*behavior*) jika mempunyai keinginan atau minat (*behavioral intention*) untuk melakukannya.

4. HASIL

4.1 Karakteristik Sampel dan Gambaran Umum Obyek Penelitian

Data dikumpulkan dari kuesioner terstruktur yang digunakan untuk menguji hipotesis. Dari 91 kuesioner yang didistribusikan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), bendahara pengeluaran, dan bendahara penerimaan, 88 koesioner dikembalikan dan valid/ lengkap. Hal ini menunjukkan tingkat respon responden yang tinggi yaitu 96,7%. Tabel 1 merupakan ringkasan karakteristik demografi responden penelitian yang berisi frekuensi dari jenis kelamin, usia, pengalaman di lingkungan pemerintahan, dan pengalaman di bidang keuangan.

Table 1. Demografi Responden

Classification		Frequency	Percent
Gender	M	29	33%
	F	59	67%
Age	21-30 years	16	18%
	31-40 years	27	31%
	41-50 years	33	38%
	>50 years	12	14%
Work experience in Government	1-5 years	12	14%
	6-10 years	20	23%
	11-15 years	15	17%
	16-20 years	22	25%
	>20 years	19	22%
Work experience in Accounting	1-5 years	46	52%
	6-10 years	27	31%
	11-15 years	8	9%
	16-20 years	4	5%
	>20 years	0	0%

4.2 Analyses of measures (Measurement Model)

Model dalam penelitian ini diuji dengan *Partial LeastSquares* (PLS), yaitu teknik pemodelan struktural yang telah didesain untuk model prediktif dengan tingkat kompleksitas yang tinggi (Chin et al. 1996; Chin 1998). SmartPLS v.3.2.1 digunakan untuk analisis dan metode bootstrap resampling (100 resamples) digunakan untuk menentukan signifikansi alur dari model struktural dalam penelitian. Tabel 3 dan tabel 4 menunjukkan hasil uji model pengukuran yang didalamnya berisi nilai *mean*, *standard deviation*, *cronbach alpha*, *factor loading*, *composite reliability*, dan *average variance extracted* (AVE).

Table 2. Deskripsi statistic dan Analisis Reliabilitas Pengukuran			
Variable	Mean	S.D	Cronbach' α
Job Relevance			
JR1	6.523	0.525	0.842
JR2	6.239	0.587	
JR3	6.330	0.562	
Output Quality			
OQ1	6.205	0.628	0.776
OQ2	5.761	1.006	
OQ3	6.114	0.702	
Computer Self-Efficacy			
CSE1	4.420	1.610	0.667
CSE2	4.455	1.646	
CSE3	4.818	1.665	
CSE4	4.466	1.626	
Perceptions of External Control			
PEC1	5.739	1.077	0.668
PEC2	5.795	0.886	
PEC3	6.136	0.647	
PEC4	3.432	1.646	
Computer Anxiety			
CA1	6.205	1.019	0.887
CA2	1.966	1.129	
CA3	1.875	0.980	
CA4	2.011	1.236	
Perceived Enjoyment			
PE1	6.114	0.823	0.859
PE2	6.045	0.815	
PE3	5.989	0.837	

Perceived Usefulness			
PU1	6.261	0.703	0.954
PU2	6.284	0.642	
PU3	6.159	0.659	
PU4	6.182	0.720	
PU5	6.239	0.643	
PU6	6.261	0.652	
Perceived Ease of Use			
PEU1	5.443	1.183	0.855
PEU2	5.341	1.249	
PEU3	5.693	1.043	
PEU4	5.534	1.124	
PEU5	5.727	0.840	
PEU6	5.750	0.950	
Attitude Toward Using			
ATU1	6.068	0.640	0.878
ATU2	5.909	0.853	
ATU3	5.807	0.882	
Behavioral Intention to Use			
BI1	5.932	0.755	0.777
BI2	5.398	1.109	
BI3	5.602	0.977	
BI4	5.727	0.919	
Actual Usage			
AU1	5.886	0.999	0.763
AU2	5.795	0.973	
AU3	5.648	1.204	
AU4	5.898	0.983	

Reliabilitas dalam penelitian ini di evaluasi menggunakan *cronbach alpha*. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 2, nilai *cronbach alpha* masing-masing konstruk penelitian > 0,6. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan validitas konvergen yang diuji dengan tiga kriteria seperti yang dinyatakan Fornell dan Larcker (1981): (1) semua item harus mempunyai *factor loading* > 0,7; (2) nilai *composite reliability* harus > 0,8; dan (3) *average variance extracted* (AVE) untuk setiap konstruk > 0,5.

Variables	Items	Factor loading	Composite Reliability	AVE
Job Relevance	JR1	(0.846)	0.905	0.761
	JR2	(0.848)		
	JR3	(0.921)		

Output Quality	OQ1	(0.835)	0.870	0.690
	OQ2	(0.825)		
	OQ3	(0.832)		
Computer Self-Efficacy			0.819	0.604
	CSE2	(0.758)		
	CSE3	(0.848)		
	CSE4	(0.813)		
Perceptions of External Control	PEC1	(0.749)	0.838	0.585
	PEC2	(0.756)		
	PEC3	(0.782)		
Computer Anxiety			0.930	0.817
	CA2	(0.909)		
	CA3	(0.924)		
	CA4	(0.877)		
Perceived Enjoyment	PE1	(0.905)	0.915	0.784
	PE2	(0.954)		
	PE3	(0.789)		
Perceived Usefulness	PU1	(0.917)	0.964	0.816
	PU2	(0.945)		
	PU3	(0.875)		
	PU4	(0.937)		
	PU5	(0.963)		
	PU6	(0.768)		
Perceived Ease of Use	PEU1	(0.701)	0.894	0.587
	PEU2	(0.617)		
	PEU3	(0.852)		
	PEU4	(0.730)		
	PEU5	(0.775)		
	PEU6	(0.889)		
Attitude Toward Using	ATU1	(0.848)	0.925	0.805
	ATU2	(0.942)		
	ATU3	(0.899)		
Behavioral Intention to Use	BI1	(0.651)	0.859	0.609
	BI2	(0.643)		
	BI3	(0.906)		
	BI4	(0.884)		
Actual Usage	AU1	(0.661)	0.850	0.588
	AU2	(0.762)		
	AU3	(0.839)		
	AU4	(0.793)		

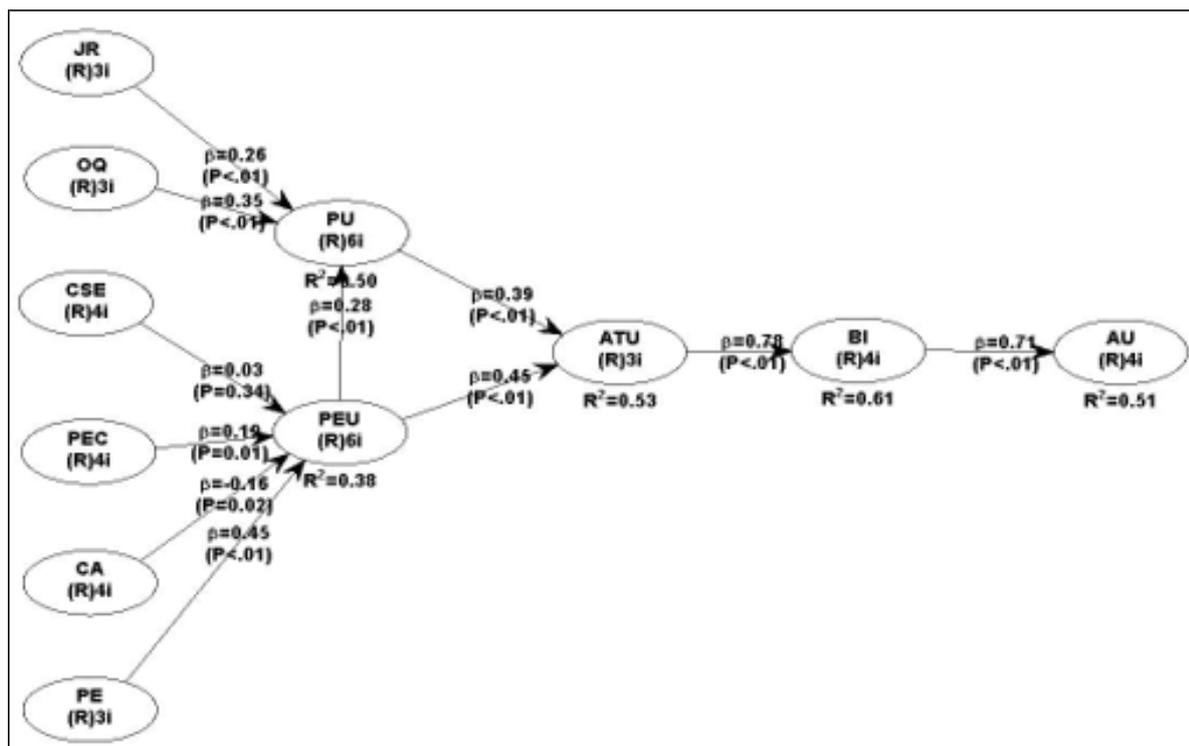
Seperti yang terlihat pada tabel 4, nilai *factor loading* masing-masing item lebih besar dari batas syarat minimum yaitu $> 0,7$. Pada nilai *composite reliability* masing-masing konstruk dalam penelitian juga lebih besar dari $0,8$. Yang terakhir, nilai AVE masing-masing konstruk lebih besar dari $0,5$. Berdasarkan ketiga kriteria tersebut, validitas konvergen dapat dipenuhi semua.

4.3 Pengujian Hipotesis dengan Model Struktural

Tahap selanjutnya dalam analisis data penelitian adalah menguji signifikansi dan kekuatan masing-masing dampak konstruk yang dihipotesiskan. Pengujian struktural digunakan untuk menentukan estimasi dari koefisien jalur, yang mengindikasikan kekuatan hubungan masing-masing variabel yang dihipotesiskan. Nilai R^2 digunakan untuk menejukkan variansi model yang dapat dijelaskan oleh variabel eksogen.

Hasil uji hipotesis (gambar 2) model struktural adalah sebagai berikut:

- Hipotesis 1a, terbukti bahwa JR memiliki efek positif ($\beta = 0,26$) terhadap PU.
- Hipotesis 1b, terbukti bahwa OQ memiliki efek positif ($\beta = 0,35$) terhadap PU.
- Hipotesis 2a, bahwa CSE tidak memiliki efek positif terhadap PEU.
- Hipotesis 2b, terbukti bahwa PEC memiliki efek positif ($\beta = 0,19$) terhadap PEU.
- Hipotesis 2c, terbukti bahwa CA memiliki efek negatif ($\beta = -0,16$) terhadap PEU.
- Hipotesis 2d, terbukti bahwa PE memiliki efek positif ($\beta = 0,45$) terhadap PEU.
- Hipotesis 3, terbukti bahwa PEU memiliki efek positif ($\beta = 0,50$) terhadap PU.
- Hipotesis 4a, terbukti bahwa PU memiliki efek positif ($\beta = 0,39$) terhadap ATU.
- Hipotesis 4b, terbukti bahwa PEU memiliki efek positif ($\beta = 0,45$) terhadap ATU.
- Hipotesis 5, terbukti bahwa ATU memiliki efek positif ($\beta = 0,78$) terhadap BI, dengan $R^2 = 61\%$.
- Hipotesis 6, terbukti bahwa BI memiliki efek positif ($\beta = 0,71$) terhadap AU dengan $R^2 = 51\%$.



Gambar 1. Hasil Uji Hipotesis

5. SIMPULAN DAN KETERBATASAN

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa semua variabel dalam model yang dikembangkan secara statistik signifikan, kecuali hubungan antara CSE dengan PEU. *Computer self-efficacy* (CSE) sebenarnya mengacu pada keyakinan kontrol individu tentang kemampuan pribadinya untuk menggunakan sistem. Dalam konteks SIMDA berbasis aktual ini, ada kemungkinan pengguna sistem merasa belum yakin dengan dirinya sendiri terutama mengenai pemahaman substansi akuntansi aktual itu sendiri. Ketidakyakinan ini kemungkinan disebabkan karena personel akuntansi di lingkungan pemerintah daerah yang menggunakan sistem ini relatif masih baru dan ada keterpaksaan dalam menerapkan akuntansi aktual yang sebenarnya mereka belum terlalu paham. Sehingga perasaan kemudahan dalam menggunakan SIMDA berbasis aktual ini terkendala dengan masalah tersebut. Ada kemungkinan dalam konteks lingkungan akuntansi pemerintah daerah, terutama di Indonesia, perlu ditambahkan variabel keterpaksaan untuk memediasi hubungan antara CSE dan PEU.

Hasil pengujian hipotesis dari prediktor utama model TAM yaitu PEU dan PU secara statistik signifikan berpengaruh terhadap sikap untuk menggunakan (ATU) SIMDA aktual (Padilla-Meléndez et al. 2013; Lin 2013; Lin et al. 2011). Dalam konteks implementasi

sistem informasi baru, SIMDA akrual akan dengan cepat memperoleh respon oleh pengguna mengenai diharapkan dapat mempunyai kebermanfaatan dan kemudahan dalam penggunaan sistem tersebut. Sikap pengguna atas SIMDA akrual yang tinggi, akan menumbuhkan minat untuk menggunakan SIMDA akrual dengan intensitas yang tinggi pula (Bhattacharjee dan Sanford 2006; Lin et al. 2011). Yang lebih menarik lagi adalah, dalam konteks pemerintahan yang bersifat mandatori, persepsi kemudahan dalam penggunaan SIMDA akrual juga diprediktor oleh persepsi kesenangan/ kenikmatan dalam menggunakan sebuah sistem. Artinya dalam kondisi implementasi sistem informasi yang mandatori, pengguna juga memerlukan sebuah kenikmatan dan kegembiraan dalam masa transisi/ migrasi sistem yang lama menuju sistem yang baru, dan jangan sampai sistem yang baru memunculkan resistensi terhadap perubahan. Atau dengan kata lain, sistem yang baru justru akan meningkatkan kecemasan, maupun penurunan keyakinan diri dalam mengimplementasikan sistem yang baru tersebut sehingga persepsi kemudahan penggunaan sistem tersebut akan rendah (Wangpipatwong et al. 2008; Venkatesh dan Bala 2008).

Pada sisi yang lain, ada 2 prediktor atas variabel kegunaan persepsian yaitu relevansi pekerjaan dan kualitas output juga berpengaruh secara statistik signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks pemerintahan, perubahan sebuah sistem informasi juga diharapkan akan meningkatkan relevansi dengan pekerjaan dan meningkatnya output atas sistem tersebut. Sehingga tingginya kebermanfaatan atas SIMDA yang berbasis akrual tersebut dapat memberikan dorongan yang kuat dari personal pengguna sistem untuk menggunakan dengan intensitas yang tinggi (Venkatesh dan Bala 2008; Hu et al. 2003).

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan. Pertama, dalam mengukur kebermanfaatan sistem dan hasil informasi GFRIS tidak membedakan masing-masing kelompok responden. Seharusnya ukuran kebermanfaatan dipisahkan antara PPK, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran karena mereka mempunyai tingkat penggunaan luaran/ informasi yang dihasilkan GFRIS yang berbeda-beda. Sehingga perbedaan kelompok responden bagi penelitian berikutnya supaya dieksplorasi lebih lanjut. Kedua, masing-masing SKPD mempunyai kompleksitas dan volume transaksi yang berbeda-beda, sehingga akan lebih baik jika penelitian selanjutnya lebih cemat lagi dalam menentukan proporsi responden dengan tingkat variabilitas tersebut. Yang terakhir, peneliti tidak mempertimbangkan faktor faktor lain yang berhubungan dengan faktor eksternal seperti regulasi/ tekanan dari pemerintah yang dapat menjadi prediktor TAM yang berhubungan dengan sistem di pemerintahan.

DAFTAR REFERENSI

- Bhattacharjee, A., dan C. Sanford. 2006. Influence Processes for Information Technology Acceptance: An Elaboration Likelihood Model. *MIS Quarterly* 30 (4):805-825.
- Chang, C. J., G. Chen, dan C. W. Chow. 2008. Exploring the Desirability and Feasibility of Reforming China's Governmental Accounting System. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management* 20 (4):482-509.
- Chin, W. W. 1998. Commentary: Issues and opinion on structural equation modeling. *MIS Quarterly* 22 (1):vii-xvi.
- Chin, W. W., B. L. Marcolin, dan P. R. Newsted. 1996. A Partial Least Squares Latent Variable Modeling Approach for Measuring Interaction Effects: Results From a Monte Carlo Simulation Study and Voice Mail Emotion/Adoption Study. *Information Systems Research* 14 (2):189-217.
- Compeau, D. R., dan C. A. Higgins. 1995a. Application of social cognitive theory to training for computer skills. *Information Systems Research* 6:118-143.
- . 1995b. Computer self-efficacy: Development of a measure and initial test. *MIS Quarterly* 19:189-211.
- Davis, F. D. 1989. Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly* 13 (3):319-340.
- . 1991. User Acceptance of Information Technology: System Characteristics, User Perceptions, and Behavioral Impacts. *Int. J. Man - Machine Studies* 38:475-487.
- Davis, F. D., R. P. Bagozzi, dan P. R. Warshaw. 1989. User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models. *Management Science* 35 (8):982-1003.
- Fishbein, M., dan I. Ajzen. 1975. *Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to theory and research*: MA: Addison-Wesley.
- Fornell, C., dan D. F. Larcker. 1981. Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. *Journal of marketing research*:39-50.
- Göğüş, Ç. G., dan G. Özer. 2014. The Roles of Technology Acceptance Model Antecedents and Switching Cost on Accounting Software Use. *Academy of Information & Management Sciences Journal* 17 (1):1-24.
- Hu, P. J.-H., T. H. Clark, dan W. W. Ma. 2003. Examining technology acceptance by school teachers: a longitudinal study. *Information & Management* 41 (2):227-241.
- Jorge, S. M., J. B. da Costa Carvalho, dan M. J. Fernandes. 2007. Governmental Accounting in Portugal: Why Accrual Basis is a Problem. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management* 19 (4):411-446.
- Lin, C.-c. 2013. Exploring the relationship between technology acceptance model and usability test. *Information Technology and Management* 14 (3):243-255.
- Lin, F., S. S. Fofanah, dan D. Liang. 2011. Assessing citizen adoption of e-Government initiatives in Gambia: A validation of the technology acceptance model in information systems success. *Government Information Quarterly* 28 (2):271-279.
- Mathieson, K. 1991. Predicting user intentions: comparing the technology acceptance model with the theory of planned behavior. *Information Systems Research* 2 (3):173-191.

- Nasi, G., dan I. Steccolini. 2008. Implementation of accounting reforms: An empirical investigation into Italian local governments. *Public Management Review* 10 (2):175-196.
- Padilla-Meléndez, A., A. R. Del Aguila-Obra, dan A. Garrido-Moreno. 2013. Perceived playfulness, gender differences and technology acceptance model in a blended learning scenario. *Computers & Education* 63:306-317.
- Saleh, Z., dan M. W. Pendlebury. 2006. Accruals Accounting in Government—Developments in Malaysia. *Asia Pacific Business Review* 12 (4):421-435.
- Simanjuntak, B. H. 2010. Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua di Sektor Pemerintahan di Indonesia. *Presented at IAI Congres XI*.
- Venkatesh, V. 2000. Determinants of perceived ease of use: Integrating control, intrinsic motivation, and emotion into the technology acceptance model. *Information Systems Research* 11 (4):342-365.
- Venkatesh, V., dan H. Bala. 2008. Technology acceptance model 3 and a research agenda on interventions. *Decision sciences* 39 (2):273-315.
- Venkatesh, V., dan F. D. Davis. 2000. A theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal field studies. *Management Science* 46 (2):186-204.
- Venkatesh, V., M. G. Morris, G. B. Davis, dan F. D. Davis. 2003. User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View. *MIS Quarterly* 27 (3):425-478.
- Wangpipatwong, S., W. Chutimaskul, dan B. Papsatorn. 2008. Understanding citizen's continuance intention to use e-government website: A composite view of technology acceptance model and computer self-efficacy. *The electronic journal of e-government* 6 (1):55-64.